

Korporatisme sebagai Paradigma bagi Pendidikan Tinggi Beserta Konsekuensinya

Ferdinand Indrajaya

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain,
Universitas Pelita Harapan
ferdinand.indrajaya@uph.edu

ABSTRAK

Pemahaman tentang relasi instrumentalistik (relasi memperlak-diperlak) antara pendidikan tinggi dengan perusahaan bisnis dan industri telah menjadi pemahaman yang berlaku umum. Pandangan tentang tugas dari pendidikan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang relevan dengan kepentingan bisnis dan industri telah diterima dan tidak lagi direfleksikan. Penerimaan pandangan ini diperkuat dan dilegitimasi oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh Dir.Jend DIKTI. Kebijakan-kebijakan tersebut semakin diperkokoh dengan permintaan Presiden Joko Widodo pada bulan Juli 2021. Isi permintaan tersebut berkenaan dengan keterlibatan para pelaku bisnis dan industri sebagai pengajar di dalam institusi-institusi pendidikan tinggi. Presiden meminta agar institusi-institusi pendidikan tinggi tidak mendidik para mahasiswa/i-nya dengan dengan kurikulum dosen, akan tetapi dengan kurikulum berbasis industri; demikian isi permintaannya. Isi tulisan dalam makalah ini merupakan tanggapan reflektif terhadap pandangan tentang relasi antara pendidikan tinggi dengan perusahaan bisnis dan industri tersebut. Makalah merupakan wujud upaya penulis untuk menunjukkan, pertama, bahwa relasi yang terbangun tersebut merupakan cerminan dari pemberlakuan korporatisme sebagai paradigma bagi keberadaan pendidikan tinggi. Kedua, bahwa pemberlakuan tersebut memiliki konsekuensi praktis-etis pada skala pendidikan tinggi itu sendiri dan pada skala yang lebih luas, yakni kehidupan berdemokrasi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut hadir dalam bentuk pergeseran-pergeseran peran dan sistem pemerintahan. Peran dosen bergeser menjadi *customer service* dengan mahasiswa/i-nya sebagai *customer*. Negara tidak lagi berperan sebagai benefaktor atau penyelenggara pendidikan, akan tetapi berubah peran menjadi klien langsung yang menuntut pendidikan tinggi untuk menyediakan *values for money*. Pergeseran-pergeseran ini pada akhirnya berpotensi mengantarkan demokrasi pada kepunahannya dan menjungkir-balikkannya menjadi korporatokrasi. Ketiga, pada bagian penutup, makalah akan berupaya menunjukkan bahwa pemberlakuan korporatisme dalam pendidikan tinggi sesungguhnya sebuah bentuk ekonomisasi pendidikan tinggi yang bersandar pada salah satu teori etika normatif, yakni utilitarisme.

Kata Kunci: korporatisme, paradigma, demokrasi, korporatokrasi, ekonomisasi, utilitarisme

PENDAHULUAN

Pertautan hirarkis antara institusi pendidikan tinggi atau universitas dengan perusahaan bisnis atau sektor industri merupakan bentuk relasi yang jarang dipertanyakan, direfleksikan, dan cenderung diterima sebagai kodrat alamiah dari keberadaan universitas itu sendiri. Istilah "kodrat alamiah" di sini menunjuk kepada

kondisi-kondisi yang berkesesuaian dengan hukum alam. Relasi dalam struktur hirarkis di antara keduanya secara populer diterima sebagai layaknya fakta fisika atau biologis. Struktur hirarkis yang dimaksudkan merujuk pada pemahaman tentang struktur yang terbangun secara vertikal; ada yang di atas dan ada yang di bawah, ada pihak yang melayani dan dilayani. Dalam konteks pertautan tersebut, universitas berposisi sebagai pihak yang melayani dan perusahaan bisnis atau industri berada sebagai pihak yang dilayani kepentingannya. Hubungan tersebut, secara populer, diterima sebagai sebuah keniscayaan yang berciri alamiah. Kendati demikian, relasi antara kedua sektor kehidupan publik tersebut sesungguhnya tidak sealamiah yang diperkirakan, akan tetapi tidak terlepas dari konstruksi-konstruksi sosial, ekonomi, dan politik yang membangunnya.

Salah satu konstruksi yang turut berperan membangun relasi hirarkis tersebut muncul dalam bentuk kebijakan Dir.Jend DIKTI tentang peran dan tujuan dari pendidikan tinggi. Dir.Jend DIKTI, dalam buku panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang diterbitkannya pada tahun 2010, menyatakan bahwa peran dan tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan para calon tenaga kerja yang keahlian serta kemampuannya dapat melayani kepentingan industri dan bisnis (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Model relasi yang sedemikian rupa kembali diminta oleh Presiden Joko Widodo, tidak lama dari saat makalah ini ditulis, untuk diperkokoh. Kekokohan tersebut, menurut beliau, dapat dicapai melalui keterlibatan para pelaku bisnis dan industri sebagai *mentor* bagi mahasiswa/i dengan kurikulum berbasis industri (Farisa, 2021). Penetrasi imperialisme perusahaan bisnis dan industri kedalam tubuh pendidikan tinggi, secara politis, mendapatkan legitimasinya melalui pernyataan Presiden tersebut.

Relasi imperialistik antara pendidikan tinggi dan industri tersebut sesungguhnya secara historis telah ditemukan cikal-bakalnya dalam konsep *link and match* pada tahun 1995 (Republika, 2008). Konsep ini diajukan oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, selaku menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada waktu itu. Beliau, melalui pengimplementasian konsep tersebut, hendak menekankan pentingnya pertautan dan kecocokan antara institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Latar-belakang dicetuskannya konsep *link and match* ini adalah peningkatan jumlah sarjana yang menganggur dan kebingungan mencari pekerjaan pada saat itu. Permasalahan ini dianggap paralel dengan ketidak-cukupan serta ketidak-sesuaian keahlian yang dimiliki para sarjana lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan praktis dunia bisnis dan industri. Konsep *link and match* diajukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengajuan serta implementasinya berpijak pada asumsi yang reduktif bahwa peningkatan jumlah pengangguran disebabkan oleh cacatnya sistem pendidikan tinggi. Asumsi reduktif ini pada akhirnya turut mempengaruhi pandangan kita sekarang tentang relasi antara pendidikan tinggi dan industri masa kini; mendorong kita untuk mewajarinya sebagai sebuah kondisi “alamiah.”

Konsisten dengan pandangan tersebut, universitas kerap dituntut untuk mempersiapkan para peserta didik serta lulusannya dalam menghadapi lingkup kehidupan profesional. Istilah “profesional” merupakan adjektiva yang tidak dapat dipahami terlepas dari istilah “profesi” dan “profesionalisme.” Istilah “profesi” dalam pemahaman yang lebih luas memiliki arti “pernyataan di depan umum (publik), pemakluman, sebuah pernyataan kepercayaan atau janji untuk bersikap

tertentu dengan orang-orang yang hadir sebagai saksinya,” namun *professio* (dalam bahasa Latin) dipahami berkaitan dengan “pekerjaan, jabatan, keahlian; hal memiliki sesuatu sebagai pekerjaan atau mata pencaharian.” (Wibowo, 2016). Kendati istilah “profesi” dalam arti luas tidak selalu terkait dengan persoalan bayar-membayar jasa atau keahlian apapun, dalam bahasa Latin, istilah ini tidak terlepas dari soal keahlian dan bayaran yang sesuai dengan keahlian tersebut. Pemahaman “profesi” dari istilah Latin tersebut turut ditemukan dalam istilah “profesionalisme.”

Istilah “profesionalisme” adalah istilah yang mencakup dua hal sekaligus, yakni penguasaan pengetahuan atau keahlian tertentu dan pelayanan yang menguntungkan klien atau pengguna jasa (Macfarlane, 2004). Bertolak dari pemahaman Dir.Jend DIKTI tentang peran dan tujuan pendidikan tinggi serta anjuran Presiden di atas, kedua hal dalam “profesionalisme” tidak dipahami secara sejajar. Penguasaan pengetahuan ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan praktisnya, yakni menguntungkan klien secara ekonomis. Keuntungan klien, selanjutnya, menjadi sarana untuk mendapatkan bayaran ekonomis yang sepadan dengan keahlian sang penyedia jasa atau barang. Pijakan rasional bagi aktivitas belajar-mengajar di aras pendidikan tinggi pada akhirnya adalah teknis-rasionalis, ekonomis, dan reduksionis; aktivitas belajar adalah baik adanya apabila mampu memberi kegunaan atau manfaat ekonomis (Bottery, 2000). Aktivitas belajar-mengajar menjadi serupa dengan model transaksi ekonomis yang dijalankan oleh perusahaan bisnis dan industri. Pengetahuan atau keahlian yang dipelajari dalam aras pendidikan tinggi tidak jauh berbeda dengan unit investasi untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan hal ini dimungkinkan dengan mengizinkan penetrasi perusahaan bisnis dan industri ke dalam tubuh pendidikan tinggi itu sendiri. Ketika hal ini dijadikan sebuah model acuan untuk memahami keberadaan pendidikan tinggi, model tersebut menjadi sebuah paradigma. Paradigma sendiri berarti model yang diacu oleh komunitas tertentu (akademisi, industrialis, pelaku bisnis, dan lain sebagainya) yang dijadikan pijakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya (Smith, 2003). Aktivitas-aktivitas yang dapat mempertahankan identitas dari keberadaan komunitas tersebut. Paradigma yang dimaksudkan berlaku dalam memahami peran dan posisi pendidikan tinggi dalam makalah ini adalah Korporatisme.

KORPORATISME DALAM TUBUH PENDIDIKAN TINGGI

Korporatisme adalah sebuah paham ideologis atau doktrin yang menempatkan kepentingan korporasi atau bisnis di atas kehidupan sosial beserta berbagai dimensinya (Villa, 2009). Korporatisme sebagai paradigma pendidikan tinggi artinya cara berada dari korporasi ditempatkan sebagai model yang diacu oleh komunitas akademik dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup berbagai cara dan pendekatan yang dipilih dalam mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini nantinya akan dicerminkan oleh aktivitas-aktivitas konkret dalam lingkup kehidupan akademik.

Pendidikan tinggi, sebagai salah satu dimensi kehidupan sosial yang menjadi pilar kunci bagi kehidupan berwarganegara, dewasa ini tidak lolos dari hipnotis korporatisme. Penyusupan kepentingan perusahaan bisnis atau industri ke dalam tubuh institusi pendidikan tinggi dalam bentuk pabrikasi pengetahuan, marketisasi

pendidikan tinggi, dan industrialisasi penelitian, adalah beberapa contoh wujud 'kerasukan' tubuh pendidikan tinggi oleh korporatisme yang berlaku juga di skala global. Pengetahuan tidak lagi dikejar demi pengetahuan itu sendiri, akan tetapi dipabrikasi untuk melayani kepentingan ekonomis dari korporasi. Dalam dan melalui institusi pendidikan tinggi yang semakin *market driven*, model relasi dosen - mahasiswa bergeser ke model pelayanan pelanggan (*customer service*) – pelanggan (*customer*). Penelitian tidak lagi eksistensial dan kreativitas di dalamnya menjadi sekadar komoditas ketika publikasi ilmiah menjadi sebuah industry yang didukung negara.

The Economist, sebuah majalah berita asal Inggris, pada bulan Oktober tahun 1997 memaparkan laporan khususnya yang diberi judul *Inside the Knowledge Factory*. Pemaparan tersebut hendak menunjukkan krisis yang terjadi secara global dalam lingkup institusi pendidikan tinggi atau universitas. Krisis tersebut berkaitan dengan pergeseran arah dedikasi universitas. Universitas, yang di awal keberadaannya mendedikasikan dirinya untuk mengejar pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri, melencengkan arahnya kepada pengejaran profit ekonomis melalui pabrikasi pengetahuan (The Economist, 1997). Pengetahuan yang dikejar untuk dilahirkan adalah pengetahuan yang mampu menguntungkan perusahaan bisnis atau industri tertentu. Cara berada universitas menjadi tidak jauh berbeda dengan cara berada sebuah pabrik. Kepabrikan ini dirajut dengan masifnya oleh infiltrasi kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan bisnis dan industri ke dalam universitas. Salah satu contoh wujud infiltrasi tersebut adalah kerjasama perusahaan multi-raksasa yang bergerak di teknologi komputer, *Microsoft*, dengan salah satu universitas tertua di Inggris, yakni Universitas Cambridge.

Universitas Cambridge, sebagaimana disampaikan oleh *The Economist*, meluap dengan rasa bangga ketika Bill Gates, sebagai milyarder pemilik *Microsoft*, memutuskan untuk mendanai universitas tersebut untuk mendirikan sebuah laboratorium ilmu komputer. Laboratorium ilmu komputer (atau Departemen Sains dan Teknologi Komputer) tersebut berdiri sebagai sebuah departemen akademik yang dalam cakupannya bergelut dengan ilmu komputer, teknologi, teknik, dan matematika (Cambridge University, 2001). Intensi di balik pendanaan tersebut tidak terlepas dari kepentingan bisnis *Microsoft* untuk bersaing dengan lawan bisnisnya di Amerika, yakni *Silicon Valley* (Ward, 1997). Bill Gates membutuhkan sebuah 'kandang peternakan' akademik guna menelurkan pengetahuan-pengetahuan terkini di bidang teknologi komputer yang dapat dipatenkan sehingga ia mampu menyaingi lawan bisnisnya tersebut.

Dukungan Universitas Cambridge terhadap kepentingan bisnis *Microsoft* tidak berhenti sebagai pabrik pengetahuan teknologis semata. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya *Cambridge Ring* pada tahun 2002 yang merupakan sebuah asosiasi infrastrukural dari Departemen Sains dan Teknologi Komputer Universitas Cambridge. Asosiasi ini menyediakan informasi, kontak, dan program-program bisnis bagi para lulusan Departemen Sains dan Teknologi Komputer tersebut (Cambridge Ring, 2021). *Cambridge Ring*, tidak lain adalah asosiasi penyalur sarjana-sarjana lulusan ilmu komputer Universitas Cambridge ke dunia industri teknologi komputer. Contoh kasus ini tidak hanya menyiratkan bagaimana universitas berada sebagai pabrik pengetahuan akan tetapi sekaligus sebagai

mesin sortir pegawai demi kepentingan perusahaan bisnis atau industri tertentu. Para peserta didik di dalamnya beserta para lulusannya turut dipersiapkan sebagai agen-agen pertumbuhan ekonomi. Peran seorang lulusan sebagai agen pertumbuhan ekonomi tidak dipahami sebagai konsekuensi dari pendidikan, akan tetapi ditempatkan sebagai sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Permasalahan lain yang masih berkaitan erat dengan terdistorsinya peran pendidikan tinggi adalah marketisasi pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai pranata peradaban yang fundamental, akan tetapi tidak lebih dari sekadar objek pasar dengan masyarakat (mahasiswa/i atau calon mahasiswa/i dan orang tua) sebagai konsumennya; pendidikan tinggi dipahami melalui model bisnis dan industri. Seraya berperan sebagai wadah pemasok tenaga kerja, universitas dewasa ini juga memperluas cakupannya sebagai tempat pelatihan mahasiswa/i sebagai konsumen. Wujud marketisasi pendidikan tinggi ini dapat diilustrasikan oleh pendidikan tinggi yang menerapkan relasi 'pelayan-pelanggan' sebagai model untuk menjalankan kegiatan akademiknya.

Sekelompok universitas yang berbasis di Inggris, pada tahun 1994, telah memeluk model 'mahasiswa/i-sebagai-pelanggan' dalam menjalankan institusinya (Furedi, 2011). Model mahasiswa/i-sebagai-pelanggan ini memanipulasi para peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan logika pasar. Pergeseran dari relasi akademik menuju ke transaksi komersial adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari ketika model 'pelanggan pasar' tersebut diadopsi sebagai model pendidikan tinggi. Pengadopsian model ini mereduksi pendidikan tinggi menjadi tidak berbeda dengan perusahaan jasa pemberi layanan (*service provider*) (*Ibid.*, hal. 4). Berbagai ritual pemasaran dilakukan demi 'kepuasan pelanggan'. Pengendalian kualitas, pemeriksaan keuangan (*auditing*), peringkat performa, kuantifikasi pengalaman belajar dari peserta didik, dan sebagainya adalah contoh-contoh ritual ke-pasar-an yang turut dijalankan oleh pendidikan tinggi dengan model "pelanggan pasar" tersebut (*Ibid.*, hal. 2).

George Ritzer, seorang pakar sosiologi asal Amerika, menggambarkan pendidikan tinggi dengan model pelanggan tersebut sebagai bagian dari sarana konsumsi edukasional. Harapan yang diarahkan mahasiswa/i ke institusi pendidikan tinggi adalah "prosedur yang tidak bertele-tele, pelayanan yang baik, mata kuliah yang berkualitas, dan harga yang murah. Mereka membawa ekspektasi-ekspektasi sebagai konsumen terhadap perusahaan-perusahaan komersial yang mereka hadapi sehari-hari ke dalam pendidikan tinggi." (Ritzer, 1998). Dalam marketisasi pendidikan, korporatisme tidak hanya terarah untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai sekrap-sekrap pelengkap mesin industri, akan tetapi juga membangun sebuah kamp konsentrasi untuk menempa para peserta didik sebagai konsumen. Contoh lain yang dapat turut mengilustrasikan bagaimana korporatisme merasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi adalah melalui jalur kegiatan publikasi ilmiah. Secara spesifik, contoh ini menunjuk kepada jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks *Scopus*. *Scopus* adalah sebuah pangkalan data (*data base*) karya tulis ilmiah dan merupakan salah satu produk dari *Elsevier*. *Elsevier* sendiri adalah sebuah perusahaan bisnis global yang bergerak di bidang analisis informasi. Salah satu prasyarat finansial yang harus dipenuhi bagi sebuah penelitian atau karya

tulis ilmiah untuk dapat diterbitkan di dalam jurnal terindeks *Scopus*, adalah membayar sejumlah uang yang tidak sedikit (berkisar antara \$400 sampai dengan \$5000) (Elsevier, 2021). Publikasi ilmiah telah menjadi industri tersendiri dengan perputaran uang yang tidak kecil. Korporatisme, melalui jalur publikasi ilmiah, mulai bekerja dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia ketika Kemenristekdikti menempatkan jurnal-jurnal yang terindeks *Scopus* sebagai orbit paradigmatik bagi publikasi ilmiah.

Kemenristekdikti, sampai pada saat ini menargetkan dua ratus jurnal akademik dari institusi-institusi pendidikan tinggi untuk terindeks *Scopus* (DIKTI, 2021). *Scopus* ditempatkan oleh Kemenristekdikti sebagai indeks acuan bagi jurnal yang bereputasi. Setiap penelitian atau karya tulis ilmiah yang berhasil diterbitkan oleh jurnal yang terindeks *Scopus*, dinilai sebagai karya tulis ilmiah yang berkualitas. Kebijakan Kemenristekdikti untuk menempatkan *Scopus* sebagai orbit bagi publikasi ilmiah, jelas mendukung kepentingan *Elsevier* sebagai sebuah industri analisis informasi. Implikasi etis dari keputusan Kemenristekdikti tersebut adalah peredupan pijar kreativitas dalam penelitian sekaligus pengasingan dosen peneliti dari subjek materi penelitiannya sendiri. Keputusan tersebut juga turut membuka celah bagi tindakan manipulatif dalam publikasi ilmiah. Manipulasi dilakukan terhadap isu, topik, atau tema penelitian agar cocok dengan isu atau topik yang dituntut oleh jurnal-jurnal terindeks *Scopus*. Kegiatan publikasi ilmiah menjadi kering kreativitas dan proses penulisan karya ilmiah tidak lagi eksistensial.

Relasi instrumentalistik antara Universitas Cambridge dengan *Microsoft*, kebijakan *link and match* yang akhirnya berujung menjadi *sink and snatch* (menenggelamkan dan merenggut) otoritas pendidikan tinggi, sakralisasi 'kepuasan pelanggan', dan imperialisme *Scopus* dalam publikasi ilmiah, adalah beberapa contoh penetrasi korporatisme dalam tubuh pendidikan tinggi. Bruce Macfarlane, dalam bukunya yang berjudul *Teaching with Integrity*, menunjukkan setidaknya ada tiga dampak praktis yang muncul di dalam tubuh pendidikan tinggi dengan korporatisme sebagai paradigma bagi keberadaannya. Dampak praktis ini tampil sebagai pergeseran peran dan posisi dari tiga bagian integral dari pendidikan tinggi, yakni peserta didik atau mahasiswa/i (termasuk para orang tuanya), para penyusun kebijakan akademik (dosen, ketua jurusan, dekan, dan sebagainya), dan negara. Pertama, para peserta didik atau mahasiswa/i terdorong untuk menempatkan diri mereka sebagai konsumen jasa pendidikan dari sistem pendidikan yang berbasis pasar (Macfarlane, 2004). Pengetahuan dipandang sebagai tidak lebih dari sekadar barang-barang konsumsi yang dapat diperalat demi karir yang diaspirasikan. Kedua, para penyusun kebijakan dalam lingkup kehidupan akademik lebih berperan sebagai manajer atau birokrat dari pada sebagai akademisi itu sendiri (*Ibid.*, hal. 14). Peran dosen tidak lebih dari sekadar *customer service* dan pelatih tenaga kerja. Jurusan, fakultas, dan universitas adalah divisi-divisi dan institusi penyelenggara tempat pelatihan tersebut dengan berbagai aparatus birokrasi dan administrasinya yang tiranistik. Aparatus birokrasi digunakan untuk menjamin efektivitas dan efektivitas merupakan pijakan bagi birokrasi (Graeber, 2015). Efektivitas sendiri dipahami sepadan dengan akuntabilitas; apabila efektif, maka akuntabel (Muller, 2018). "Seberapa efektif sebuah pendekatan atau metode mengajar dalam memproduksi agen-agen pertumbuhan ekonomi?" menjadi pertanyaan yang hendak ditunjukkan jawabannya melalui berbagai aparatus birokrasi dan administrasi tersebut. Dimensi

kualitatif serta eksistensial dari pendidikan direduksi menjadi sekadar persoalan formal dan agregasi data statistik.

Ketiga, negara (alih-alih menjadi benefaktor pendidikan), melalui korporatisme, menempatkan keberadaannya sebagai klien langsung, dan tidak jauh berbeda dengan posisi mahasiswa/l, orang tua, dan para pembayar pajak secara umum (Macfarlane, 2004). Keberadaannya sebagai klien langsung menuntut universitas untuk menyediakan “values for money.” Keterlibatan negara untuk mengiyakan korporatisme sebagai sebuah paradigma bagi pendidikan tinggi berpotensi menempatkan demokrasi dalam kondisi koma dan mengantarkannya ke korporatokrasi. Korporatokrasi adalah sebuah sistem politik yang melaluinya keberadaan korporasi bersama kepentingannya mengintervensi pengaturan agenda kebijakan publik (Sachs, 2011). Dalam korporatokrasi, universitas tidak lagi berperan sebagai penjaga demokrasi. Keberadaannya tidak lagi berperan untuk mengasah kepekaan akan rasa keadilan sosial, improvisasi lingkungan, partisipasi politik yang sehat, dan menjaga kesadaran peserta didik sebagai warga negara (Spring, 2015); hal-hal yang krusial dalam mengisi kehidupan yang demokratis. Alih-alih, pendidikan tinggi berperan sebagai *asylum* korporatistik yang menjadi tempat pembiakan tenaga kerja dan laboratorium untuk memonetasi berbagai aspek kehidupan manusia.

PENUTUP

Penerapan korporatisme sebagai sebuah paradigma bagi keberadaan pendidikan tinggi sesungguhnya merupakan bentuk ideologis dari ekonomisasi sektor pendidikan. Ekonomisasi sektor pendidikan ditandai oleh menjalarnya perspektif ekonomi ke dalam tubuh dunia pendidikan tinggi. Penjalaran perspektif ekonomi ini tampil melalui kegiatan penelitian yang dipengaruhi oleh kebutuhan pasar, evaluasi terhadap efektivitas dari institusi pendidikan (sekolah, universitas) yang berpijak pada analisis biaya dan laba, dan promosi pilihan institusi pendidikan dalam persaingan pasar (*Ibid.*, hal. 2). Ekonomisasi pendidikan mengadvokasi penerapan prinsip-prinsip pasar yang diwakili oleh istilah-istilah seperti kompetisi, investasi, pilihan konsumen, pendidikan demi laba, kemajuan ekonomi, dan perdagangan bebas di skala global ke dalam layanan-layanan edukasional. Penerapan istilah-istilah tersebut pada akhirnya dan secara praktis turut mempengaruhi pandangan publik tentang ciri keberadaan institusi-institusi pendidikan tinggi secara umum. Institusi-institusi pendidikan dipahami serupa dengan industri yang mengambil keputusan-keputusan ekonomis untuk merawat terus menerus siklus produksi-konsumsi. Corak cara berada ini juga yang turut berlaku dalam pendidikan tinggi yang berbasis korporatisme.

Korporatisme pendidikan tinggi, yang merupakan bentuk dari ekonomisasi, sesungguhnya turut dilatari dan merupakan konsekuensi praktis dari penerapan teori etika utilitarisme. Utilitarisme adalah salah satu teori etika atau sebuah aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip kegunaan atau manfaat (Sudarminta, 2013). Kegunaan atau manfaat ditempatkan sebagai prinsip tolak ukur untuk menilai apakah sebuah tindakan dapat dibenarkan secara moral atau tidak. Dari perspektif teori etika ini, tindakan yang menghasilkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak adalah tindakan yang baik secara moral. Kesejahteraan

material atau ekonomis adalah hal yang turut dicakup oleh kategori manfaat dalam utilitarisme (Perkins, 2021). Yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat ekonomis kepada sebanyak mungkin pihak. Kendati terdengar baik-baik saja, teori etika ini memiliki sekurang-kurangnya dua kesulitan.

Kesulitan pertama adalah kesulitan menentukan nilai dari sebuah manfaat atau akibat (Sudarminta, 2013). Dalam lingkup pendidikan tinggi yang menerapkan korporatisme sebagai paradigmanya, bagaimana kita dapat menilai bahwa peminatan atau jurusan yang dipilih membawa kebahagiaan karena mengakibatkan kita mendapatkan gaji yang besar? Atau bagaimana menyelaraskan kebaikan kualitas hidup dengan keuntungan ekonomis yang didapatkan? Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul juga adalah: apakah sebuah pembelajaran menjadi tidak ada nilainya atau buruk secara moral ketika tiada manfaat ekonomis yang muncul darinya? Tidakkah banyak tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berujung pada keuntungan ekonomis tapi bernilai dan membawa kebahagiaan? Sebagai contoh misalnya, mengasahi orang tua kita sendiri. Pada saat kita merawat orang tua sendiri, tidak jarang kita menghabiskan uang alih-alih mendapatkannya. Kendati demikian apakah tindakan ini tidak bernilai? Apakah karena kita tidak mendapatkan profit ekonomis dari tindakan merawat orang tua kita sendiri, maka tindakan tersebut buruk secara moral? Singkatnya, tidak seluruh dimensi kualitatif dari kehidupan manusia dapat direduksi ke dimensi kuantitatifnya. Moralitas sebagai sebuah nilai sesungguhnya sulit untuk diukur dengan jumlah manfaat yang diakibatkan oleh sebuah tindakan.

Kesulitan kedua yang muncul dari utilitarisme berkenaan dengan prinsip keadilan (*Ibid.*, 133). Permasalahan ini adalah permasalahan yang secara kritis dapat dikemukakan terhadap setiap penentuan sebuah kebijakan (baik formal maupun informal) dari pihak yang lebih berkuasa dengan menerapkan kaidah utilitarian sebagai acuan bagi argumentasinya. Sebagai contoh misalnya seorang calon mahasiswa diminta oleh orang tuanya (pihak yang berkuasa secara ekonomis) untuk memilih berkuliah di jurusan A atau tidak diizinkan berkuliah sama sekali. Argumentasi dari pihak orang tua adalah jurusan A yang dijanjkannya akan mendatangkan kemudahan dalam mencari pekerjaan atau lebih bermanfaat secara ekonomis dari pada jurusan B yang diminati sang anak. Pijakan dari argumentasi tersebut adalah data-data yang menunjukkan bahwa banyak lulusan dari jurusan A lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih besar dibandingkan lulusan dari jurusan B. Dari perspektif utilitarian, tuntutan dari orang tua tersebut dapat dibenarkan. Tuntutan tersebut dibenarkan karena berpijak pada kaidah utilitarian yang menekankan sebesar-besarnya manfaat bagi sang anak. Kendati demikian, tuntutan tersebut tentunya menciderai rasa keadilan dari sang anak. Dari perspektif prinsip keadilan, setiap manusia sebagai seorang pribadi (*persona*) sesungguhnya bernilai dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri (*Ibid.*, 134). Hak asasi sang anak dalam menentukan pilihannya tidak selayaknya dibungkam dan dikorbankan dengan mengatas-namakan kesuksesan ekonomis dari banyak orang yang belum tentu bernilai bagi diri sang anak sendiri.

Pembiaran (pengiyaan terus-menerus) terhadap korporatisme sebagai paradigma bagi keberadaan pendidikan tinggi tidak hanya memiskinkan pandangan kita tentang manusia akan tetapi juga berpotensi menjorokkan demokrasi menuju

ke korporatokrasi. Dalam dan melalui korporatisme, membangun masyarakat demokratis yang beradab dan inklusif tidak lagi menjadi bidikan prinsipil dari pendidikan tinggi ketika aktivitas belajar direduksi untuk memperoleh kegunaan atau manfaat ekonomis semata. Kesadaran-kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, partisipasi politik, dan kewarganegaraan dalam demokrasi tidak lagi menjadi orbit ketika institusi-institusi pendidikan tinggi berada sebagai tempat pembiakan tenaga kerja semata. Pemiakan tenaga kerja ini dilakukan dengan mengkorporatisasi sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan pasar global dan hasrat dari perusahaan-perusahaan multinasional (Spring, 2015).

Isi tulisan dari makalah ini bukanlah berupa sebuah ajakan untuk membangun sikap bermusuhan dengan perusahaan bisnis atau industri. Makalah juga tidak ditulis sebagai senandung kidung pesimistik total terhadap kemungkinan pendidikan tinggi untuk berkolaborasi dengan korporasi. Banyak dari kegiatan penelitian yang terbantu dengan keterlibatan korporasi dan hal ini patut diapresiasi. Hal yang patut diwaspadai bukan keterlibatan korporasi yang proporsional dalam tubuh pendidikan tinggi, akan tetapi korporatisme sebagai satu-satunya paradigma bagi keberadaan pendidikan tinggi. Penolakan tidaklah tepat apabila diarahkan ke aktivitas yang kolaboratif, namun sangatlah manusiawi bila penolakan diarahkan ke imperialisme korporasi atas pendidikan tinggi. Imperialisme yang berujung pada tererosinya integritas universitas dan komatisasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bottery, Mike. *Education, Policy, and Ethics*. London and New York: Continuum, 2000.

Furedi, Frank. "Introduction to the marketisation of Higher Education and the Student as Consumer", dalam *The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer*, diedit oleh Mike Molesworth, Richard Scullion, dan Elizabeth Nixon, 1-7. Oxon: Routledge, 2011.

Godfrey-Smith, Peter. *Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science*. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

Graeber, David. *The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy*. New York: Melville House Publishing, 2015.

Macfarlane, Bruce. *Teaching with Integrity: The Ethics of Higher Education Practice*. London: RoutledgeFalmer, 2004.

Muller, Jerry Z. *The Tyranny of Metrics*. New Jersey: Princeton University, 2018.

Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

Ritzer, George. *The McDonaldization Thesis: Explorations and Extensions*. London: SAGE Publications, 1998.

Sachs, Jeffrey D. *The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity*. New York: Random House, 2011.

Setyo Wibowo, A. "Platon dan Komitmen Profesi." Dalam *Filsafat Untuk Para Profesional*, diedit oleh F. Budi Hardiman, 1-33. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

Spring, Joel. *Economization of Education: Human Capital, Global Corporations, Skills-Based Schooling*. New York: Routledge, 2015.

Suarez-Villa, Luis. *Technocapitalism: A Critical Perspective on Technological Innovation and Corporatism*. Philadelphia: Temple University Press, 2009.

Sudarminta, J. *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

SUMBER DARING

Cambridge Department of Science and Technology. "About I Department of Computer Science and Technology." Diakses 7 November 2021. <https://www.cst.cam.ac.uk/about>.

Cambridge Ring. "Cambridge Ring." Diakses 7 November 2021. <https://www.cst.cam.ac.uk/ring>.

Elsevier. "Journal Pricing." Elsevier. September 13, 2021. <https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/apc-pricelist>.

Farisa, Fitria C. "Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen." Kompas. Juli 27, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/13285771/jokowi-minta-kampus-didik-mahasiswa-dengan-kurikulum-industri-bukan-dosen>.

Perkins, John L. "Humanism and Morality." Diakses 8 November 2021. <http://home.alphalink.com.au/~jperkins/humoral.htm>.

Republika. "Wardiman: Dunia Pendidikan Harus Link dan Match." Republika. Desember 19, 2008. <https://www.republika.co.id/berita/shortlink/21227>.

Risbang Ristek DIKTI. "Kemenristekdikti Targetkan 200 Jurnal Mendaftarkan untuk Terindeks Scopus atau Web of Science Tahun 2019." Diakses 2 November 2021. <https://risbang.ristekdikti.go.id/publikasi/berita-kegiatan/kemenristekdikti-targetkan-200-jurnal-mendaftarkan-untuk-terindeks-scopus-atau-web-of-science-tahun-2019/>.

The Economist. "Inside the Knowledge Factory." The Economist. Oktober 4, 1997. <https://www.economist.com/special-report/1997/10/02/inside-the-knowledge-factory>.

Ward, Lucy. "Bill Gates chips in to help Cambridge." Independent. September 25, 1997. <https://www.independent.co.uk/news/bill-gates-chips-in-to-help-cambridge-1241153.html>.